



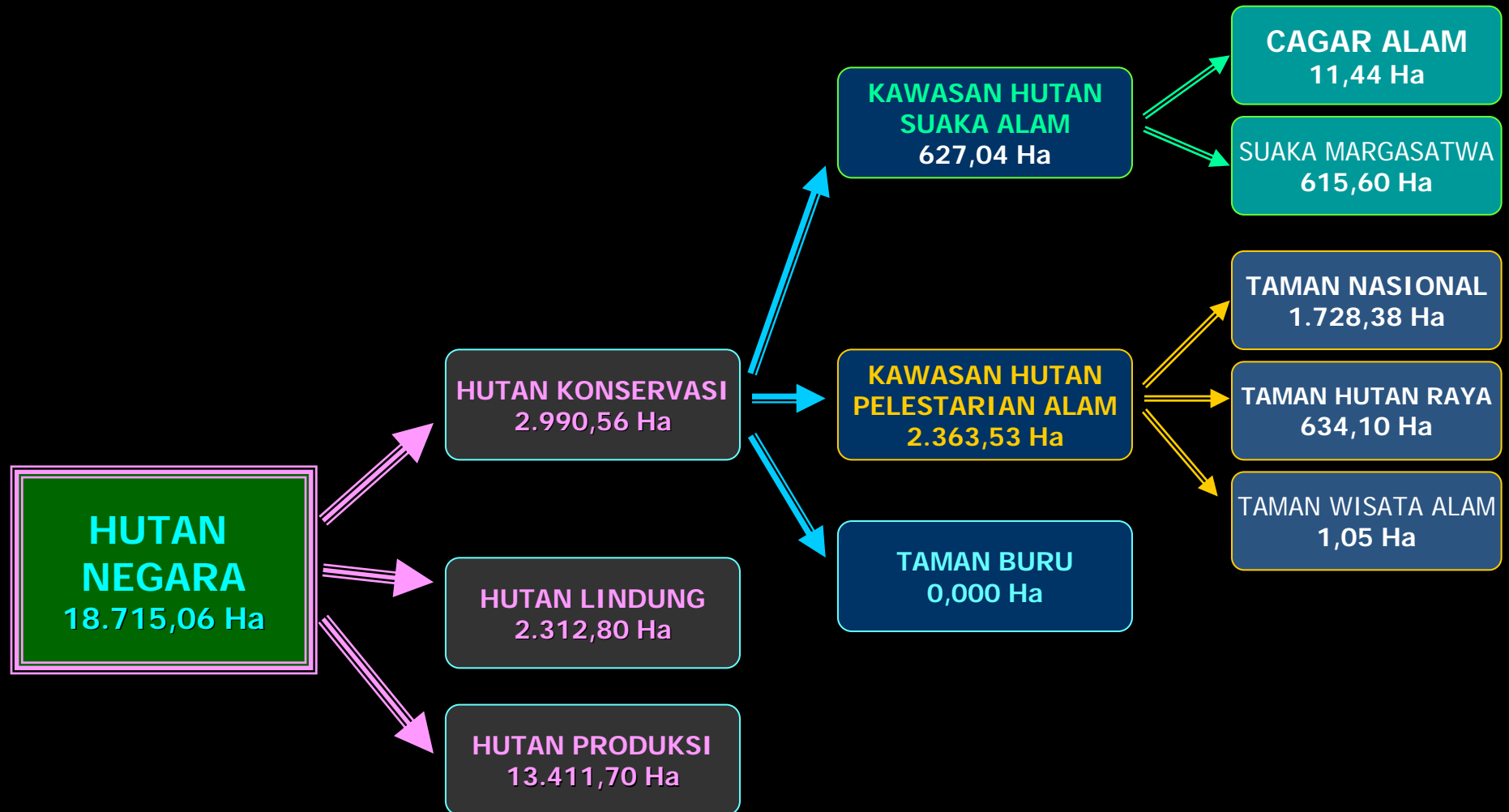
**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jalan Argulobang No. 19 Baciro, YOGYAKARTA. Telp. (0274) 512447, 588518

**PERKEMBANGAN DAN KENDALA IMPLEMENTASI
SKEMA-SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PP 6/ 2007 DI PROVINSI DIY**

Lokakarya "Membedah Implementasi Skema Pemberdayaan Masyarakat
Dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 di Provinsi DIY".
Yogyakarta, 5 November 2008

KERAGAAN FUNGSI HUTAN DI PROVINSI DIY

UU No.41/1999 dan UU No.5/1990



KERAGAAN LUAS HUTAN TIAP KABUPATEN DI PROVINSI DIY

Gunungkidul	14.859,50 Ha	Termasuk Hutan AB
Bantul	1.052,60 Ha	
Kulon Progo	1.037,50 Ha	
Sleman	1.729,46 Ha	1.728,38 Ha menjadi TNGM
JUMLAH :	18.715,06 Ha	

VISI DAN MISI

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI DIY

VISI :

Terwujudnya hutan lestari dan agribisnis perkebunan yang berdaya saing.

MISI :

(1). Memantapkan status dan fungsi hutan. (2). Optimalisasi manfaat hutan secara lestari. (3). Mewujudkan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya. (4). Mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan. (5). Mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya. (6). Meningkatkan kualitas SDM kehutanan dan perkebunan.

Filosofi pembangunan kehutanan dan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir, serta optimalisasi manfaat hutan dan lahan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

Tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT

- 1. Untuk mendapatkan manfaat SDH secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.**
- 2. Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan kewajiban pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab kepala KPH.**
- 3. Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan melalui :**
 - a. Hutan Desa**
 - b. Hutan Kemasyarakatan**
 - c. Kemitraan**



DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Argulobang No. 19 Baciro, YOGYAKARTA. Telp. (0274) 512447, 588518

HUTAN DESA

(HD)



1. **HUTAN DESA** dapat diberikan pada **HUTAN LINDUNG** dan **HUTAN PRODUKSI**.
 - **Hutan Lindung** : Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - **Hutan Produksi** : Pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
2. Menteri menetapkan areal kerja Hutan Desa berdasarkan usulan bupati/walikota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.
3. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Hutan Desa dilakukan dengan memberikan Hak Pengelolaan kepada Lembaga Desa.
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan Hutan Desa.

RENCANA PENGEMBANGAN HUTAN DESA



POTENSI : Hutan Produksi di Kabupaten Gunungkidul

HASIL IDENTIFIKASI :

NO	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan	49,13 Ha
2	Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan	6,44 Ha
3	Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang	92,45 Ha
4	Desa Girisuko, Kecamatan Panggang	2,74 Ha
5	Desa Jetis, Kecamatan Saptosari	7,85 Ha
6	Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari	364,34 Ha
7	Desa Kepek, Kecamatan Saptosari	32,39 Ha
8	Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari	37,39 Ha
9	Desa Monggol, Kecamatan Saptosari	32,45 Ha
10	Desa Ngloro, Kecamatan Saptosari	2,15 Ha
11	Desa Planjan, Kecamatan Saptosari	52,31 Ha
	JUMLAH :	679,64 Ha

KENDALA

1. LEMBAGA DESA sesuai Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2008 belum dibentuk.
2. Skema Hutan Desa ini baru dalam proses inisiasi dan identifikasi sekilas.
3. Lokasi (Hutan AB) belum clear dan clean.
4. Akan terkendala dalam kegiatan tata areal, penyusunan rencana, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan Hutan Desa.



DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Argulobang No. 19 Baciro, YOGYAKARTA. Telp. (0274) 512447, 588518

HUTAN TANAMAN RAKYAT

(HTR)

RENCANA PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR)

The logo for HTR (Hutan Tanaman Rakyat) consists of the letters 'HTR' in a bold, yellow, sans-serif font. Each letter has a red outline and a slight shadow effect, giving it a 3D appearance.

POTENSI :

Hutan Produksi Di Kabupaten Gunungkidul

HASIL IDENTIFIKASI :

NO	LOKASI	LUAS (Ha)
1	Desa Balong, Kecamatan Girisubo	107,26 Ha
2	Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo	38,41 Ha
3	Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus	17,71 Ha
4	Desa Wunung, Kecamatan Wonosari	62,88 Ha
5	Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu	64,98 Ha
6	Desa Candirejo, Kecamatan Semanu	36,49 Ha
	JUMLAH :	327,73 Ha

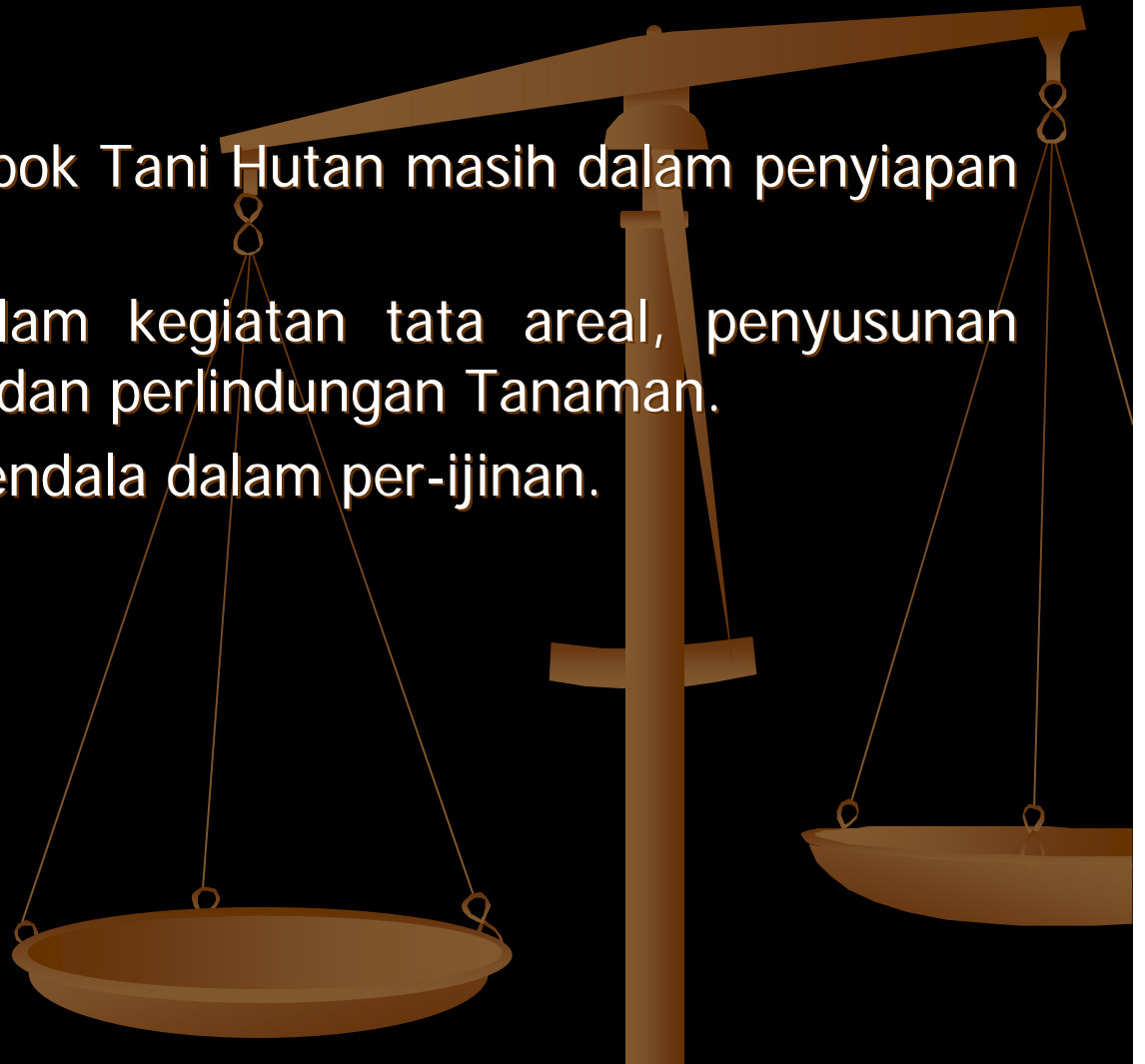
PROSES

HTR

1. Identifikasi calon lokasi dan pemetaan.
2. Usulan Bupati Gunungkidul.
3. Telaahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.
4. Surat usulan Gubernur DIY kepada Menteri Kehutanan, (surat dimaksud belum terbit).

KENDALA

1. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan masih dalam penyiapan dan fasilitasi.
2. Akan terkendala dalam kegiatan tata areal, penyusunan rencana, rehabilitasi dan perlindungan Tanaman.
3. Mungkin akan ada kendala dalam per-ijinan.





DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Argulobang No. 19 Baciro, YOGYAKARTA. Telp. (0274) 512447, 588518

HUTAN KEMASYARAKATAN

(HKm)

JUMLAH KELOMPOK TANI HKm DI PROVINSI DIY TAHUN 2003 – 2004 MENDAPAT IJIN SEMENTARA SEBANYAK 42 KELOMPOK TANI, TERDIRI DARI KABUPATEN KULON PROGO 7 KELOMPOK DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 35 KELOMPOK.

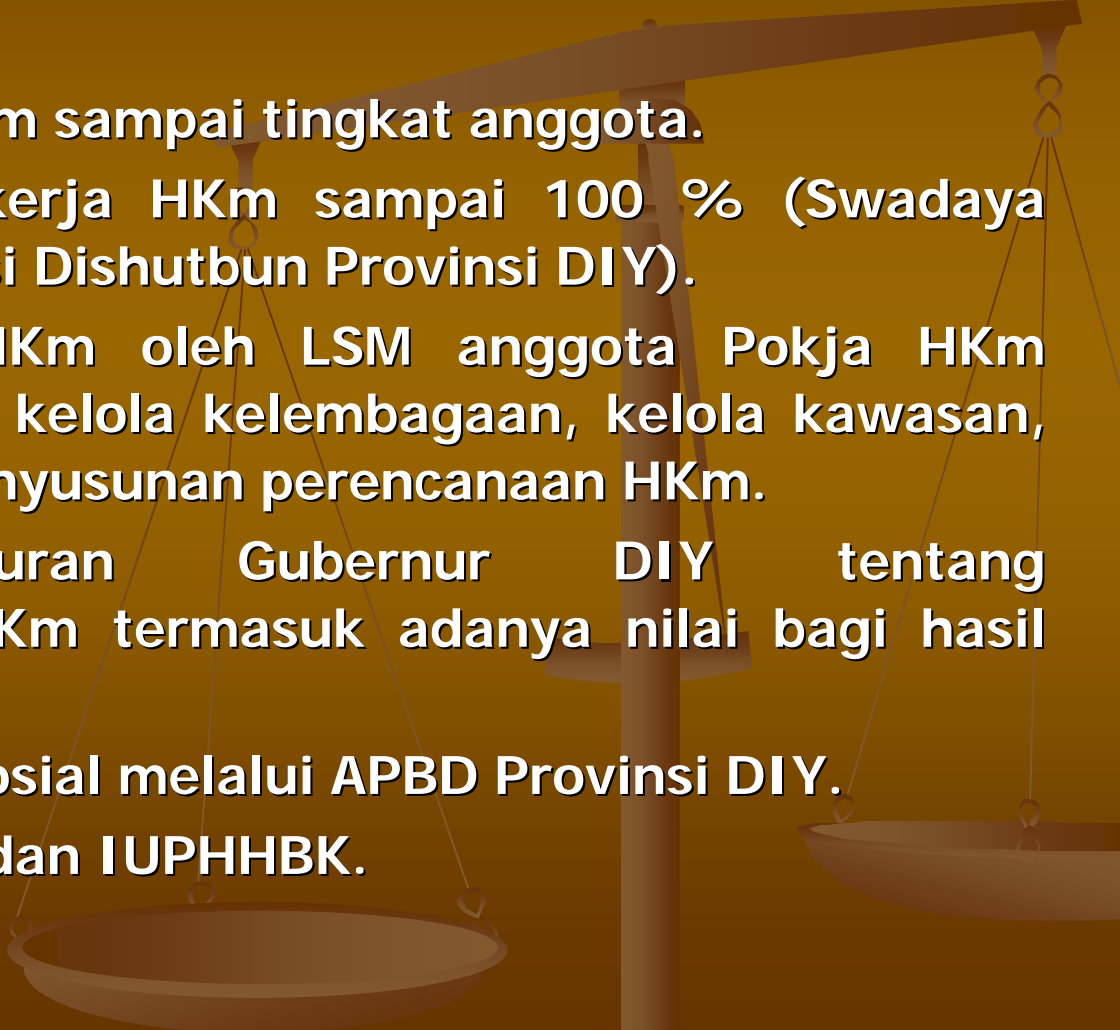
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHARAPKAN KELOMPOK TANI HKm TERSEBUT MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK DAPAT MEMBENTUK KOPERASI SEBAGAI PERSYARATAN SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 31/Kpts-II/2001 UNTUK MENERIMA IJIN DEFINITIF PENGELOLAAN HKm.

UPAYA-UPAYA :

- **Fasilitasi dan pendampingan dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.**
- **Fasilitasi pembentukan Koperasi, 42 Kelompok Tani HKm tergabung menjadi 14 Koperasi.**
- **Verifikasi terhadap 42 Kelompok Tani HKm tentang penyelenggaraan HKm oleh Tim Terpadu dari Ditjen RLPS, Dinas Hutbun Provinsi DIY, Perguruan Tinggi, BP DAS SOP dan LSM.**
- **Surat Dirjen RLPS (No.353/V-BPS/2007 tanggal 8 Oktober 2007) kepada Gubernur DIY bahwa :**
 - 1. Gubernur DIY usul penetapan areal kerja HKm.**
 - 2. Bupati agar mempersiapkan IUPHKm.**

- Terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY.
- Terbit Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 434/Menhut-II/2007 tanggal 11 Desember 2007 tentang Penetapan Areal Kerja HKm di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.
- Launching HKm oleh Wakil Presiden RI di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY pada tanggal 15 Desember 2007. (ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 433 dan 434, penyerahan IUPHKm oleh Bupati Gunungkidul dan Bupati Kulon Progo). Bersamaan dengan Launching Penetapan Wilayah Kerja KPH Yogyakarta.

KEGIATAN TAHUN 2008

- Pemetaan lokasi HKm sampai tingkat anggota.
 - Penanaman areal kerja HKm sampai 100 % (Swadaya KTHKm dan Fasilitas Dishutbun Provinsi DIY).
 - Pendampingan KTHKm oleh LSM anggota Pokja HKm Provinsi DIY dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha dan penyusunan perencanaan HKm.
 - Menyusun Peraturan Gubernur DIY tentang Penyelenggaraan HKm termasuk adanya nilai bagi hasil kayu.
 - Fasilitas Bantuan Sosial melalui APBD Provinsi DIY.
 - Penyiapan IUPHHK dan IUPHHBK.
- 
- A large, faint watermark of a balance scale is visible in the background of the slide, positioned on the right side.

KENDALA



1. Di Kabupaten Gunungkidul : Penggabungan 35 KTHKm menjadi 7 Koperasi. Antar KTHKm belum dapat menggabung secara totalitas.
2. Kemampuan administrasi KTHKm masih kurang, disisi lain Perencanaan KTHKm harus segera diselesaikan.
3. Pengembangan usaha masih terbatas.
4. Dalam kelola usaha : masih ada kendala dalam akses pemasaran dan teknologi.

KESIMPULAN

*PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT
BERDASARKAN PP 6/2007 jo PP 3/2008*

1. Pemberdayaan masyarakat setempat dapat dilakukan melalui :
 - (1). Hutan Desa,
 - (2). Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan
 - (3). Kemitraan.
2. Untuk di Provinsi DIY :
 - = Hkm telah dilaksanakan.
 - = HTR dalam proses usulan oleh Gubernur DIY.
 - = Hutan Desa baru dalam proses identifikasi lokasi.
3. Untuk mendorong dan percepatan proses skema-skema pemberdayaan masyarakat di Provinsi DIY diperlukan peran aktif para pihak.

A photograph of a sunset over the ocean. The sun is a bright yellow orb on the horizon, casting a shimmering path of light across the dark water. The sky is a gradient of orange and yellow. The text "Sekian, dan Terima Kasih" is overlaid in a stylized blue font with a red outline.

Sekian, dan Terima Kasih